

Judul : Fadli: Hak Publik Untuk Mendapat Informasi Dijamin Oleh Konstitusi: Open Parliament Jaga Demokrasi Indonesia

Tanggal : Kamis, 15 Agustus 2019

Surat Kabar : Rakyat Merdeka

Halaman : 7

Open Parliament Jaga Demokrasi Indonesia

Fadli: Hak Publik Untuk Mendapat Informasi Dijamin Oleh Konstitusi



Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kiri) menjadi pembicara di House Democratic Partnership (HDP) Leadership Forum, Gedung Thomas Jefferson, Library of Congress, Washington, Amerika Serikat (AS), Selasa (16/7).

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan, Negara-negara yang mempraktikkan demokrasi liberal, bisa tergelincir pada otoritarianisme jika komitmen untuk merawat nilai-nilai demokrasi tidak dijaga. Menurutnya, pemilu yang bebas, jujur dan adil, tidak otomatis menjamin kelangsungan demokrasi, karena di antara penyelenggaraan pemilu harus ada pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

“JIKA tak ada kontrol legislatif, masyarakat sipil, dan media massa, demokrasi bisa tergelincir menjadi prosedur belaka. Namun, praktik aslinya adalah otoritarianisme,” ujar Fadli saat berbicara di House Democratic Partnership (HDP) Leadership Forum, Gedung Thomas Jefferson, Library of Congress, Washington, Amerika Serikat (AS), Selasa (16/7/2019).

Acara yang dihadiri oleh para pimpinan parlemen dari negara-negara mitra HDP itu, diselenggarakan oleh National Democratic Institute (NDI) dan International Republican Institute (IRI), dua lembaga non-profit yang fokus pada penguatan demokrasi. Pada kesempatan itu, Parlemen Indonesia diwakili oleh Wakil Ketua DPR, Fadli Zon (Fraksi Partai Gerindra) dan Desy Ratnasari (Fraksi PAN).

Dalam forum tersebut para pimpinan parlemen, termasuk pimpinan parlemen AS, saling

bertukar pikiran tentang isu-isu terbaru demokrasi. Sejumlah pembahasan terkait ancaman demokrasi yang berkembang saat ini, seperti berkembangnya otoritarianisme, propaganda anti-demokrasi, dan polarisasi politik, mengemuka dalam forum tersebut.

Melanjutkan keterangannya, Fadli mengatakan, tak ada solusi tunggal dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut. Sebab, tidak ada rumus tunggal tentang bagaimana demokrasi harus dijalankan.

“Yang jelas, demokrasi adalah tentang rakyat. Titik pijak kita adalah rakyat. Karenanya, kita harus bisa menempatkan diri di posisi rakyat agar bisa melihat semua dari sudut pandang mereka, rakyat, publik, konstituen. Jika kita bisa memahami perspektifnya, mudah bagi politisi untuk mendapatkan kepercayaan rakyat,” jelas Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu.

Pada pertemuan itu, selu-

ruh pimpinan parlemen yang hadir sepakat, demokrasi masih menjadi pilihan paling layak. Meski menghadapi berbagai tantangan, demokrasi adalah satu-satunya jalan yang memberi alat kontrol terhadap kekuasaan, serta memungkinkan terjadinya check and balances untuk menjaga kepentingan publik.

“Menciptakan dan menjaga demokrasi memang tidak mudah. Ini juga berlaku untuk negara seperti Amerika Serikat. Perkembangan teknologi digital ikut memberi tantangan. Sebab, jika tak direspon dengan baik, akan muncul kesenjangan antara tuntutan publik di era digital dengan praktik demokrasi konvensional,” urai Fadli.

Tantangan tersebut, sambung Fadli, mendorong peran parlemen dalam menjunjung tinggi keterbukaan dan transparansi. Terlebih, Indonesia berada peringkat keenam dalam hal pengguna internet di dunia.

“Menurut Asosiasi Penyedia Internet Indonesia, pengguna internet pada tahun 2019 mencapai 171 juta orang, sekitar 150 juta di antaranya adalah pengguna media sosial aktif. Inilah menjadikan media sosial sebagai arena demokrasi baru, tempat publik menuangkan dan membagi unek-uneknya,” jelas dia.

Untuk merespon perkem-

bangkan tersebut, lanjut dia, DPR telah melangkah jauh. Selain menggunakan berbagai platform media sosial, seperti Facebook, Youtube, Twitter, dan media sosial lainnya, DPR juga mengembangkan Sistem Informasi Legislasi (Sileg), dan membangun aplikasi “DPR Now!”, yang berfungsi sebagai jembatan informasi antara DPR dan masyarakat.

“Pada intinya, DPR sedang mencari cara terbaik untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses pembuatan perundang-undangan, melalui pemanfaatan teknologi digital. Sebuah proyek percontohan telah dikembangkan melalui partisipasi publik dalam Sistem Perancangan Legislatif, saluran berbasis web untuk memastikan aspirasi dan pendapat publik bisa disalurkan melalui mekanisme online,” jelas dia.

Ia berharap, DPR mampu menyediakan produk legislatif yang lebih baik dan lebih akomodatif terhadap kepentingan rakyat melalui berbagai inovasi dan komitmen tersebut. “Itulah tujuan dari komitmen Open Parliament (Parlemen Terbuka). Bagi DPR, Parlemen Terbuka berarti, kita bertindak untuk memastikan publik dapat dengan bebas menggunakan hak dasar mereka, hak untuk mengetahui yang dijamin dan dilindungi oleh Konstitusi, terutama Pasal 28F,” tegas dia.

Pada tahun ini, ungkap dia, DPR telah bergabung dalam Open Parliament (OP) dan mengajukan Rencana Aksi Keterbukaan Parlemen ke Open Government Partnership (OGP). “Ini adalah organisasi yang mempromosikan pemerintahan terbuka (open government), memerangi korupsi, memberdayakan masyarakat, dan memanfaatkan teknologi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Semua itu adalah bukti komitmen DPR terhadap keterbukaan dan transparansi,” tandasnya. ■ ONI/TIM